

## Analisis Kinerja APBD Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Medan

<sup>1</sup>Ananda Febriyanti, <sup>2</sup>Ainun Syifa, <sup>3</sup>Diki Chandra

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : [anandabutarbutar71@gmail.com](mailto:anandabutarbutar71@gmail.com), [syifacph@gmail.com](mailto:syifacph@gmail.com), [cdiki744@gmail.com](mailto:cdiki744@gmail.com)

Corresponding Mail Author: [anandabutarbutar71@gmail.com](mailto:anandabutarbutar71@gmail.com)

---

**Abstract :** Regional financial management is entirely in the hands of local governments. The APBD describes the ability of local governments to manage their finances. This research is a descriptive research that aims to determine the independence and regional financial performance of the city of Medan in terms of growth ratio analysis in the APBD. The results of the study show the financial performance of the Medan City Government in 2015-2021. Where the highest PAD Growth ratio occurred in 2017 which was -26.3% and the lowest occurred in 2020 which was -17.49%. Meanwhile, the highest Regional Revenue Growth in Medan City occurred in 2019, namely -29.74% and the lowest revenue growth occurred in 2020, namely -25.31%. For Regional Expenditure itself, the highest occurred in 2019, namely -20% and the lowest Regional Expenditure growth occurred in 2020, namely -21%. The Growth Ratio from period 2015 to period 2021 is still fluctuating.

**Keywords:** APBD, Growth Ratio, Medan City.

---

### I. Pendahuluan

Otonomi Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus sendiri seluruh urusan pemerintahannya berdasarkan perundang undangan yang berlaku, dengan adanta otonomi pemerintah tidak mempunyai batasan dalam membangun daerahnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah ada dua asas yaitu desentralisasi dan dekonsentralisasi. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Unsur utama penyelenggaraan otonomi adalah dengan mengutamakan pengelolaan keuangan daerahnya, dan dalam keuangan daerah banyak faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen dan lainnya.

Dalam mengelola keuangan daerah dengan berlakunya otonomi daerah yang bersifat efisien dan akuntabel, dengan bisa memanager keuangan daerah dengan baik merupakan kunci dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan perlu terus dilakukan untuk melihat apakah strategi

yang dilakukan sudah berhasil dicapai sesuai target. Dengan adanya pengukuran kinerja pemerintah bisa mendapat feedback untuk membentuk perbaikan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio dilakukan untuk membandingkan kinerja dari pencapaian yang dicapai suatu periode dan dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat dilihat kinerja yang terjadi.

## II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi  
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan
2. Perencanaan  
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
3. Pengawasan  
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi  
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi  
Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi  
APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:
  1. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
  2. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.

3. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan Belanja daerah terdiri dari :
  1. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
  2. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
  3. Belanja Tidak Terduga
  4. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
  1. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
  2. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya.

Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah)

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. APBD menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian pemerintah 15 daerah dituntut mandiri dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah dengan menggali, mendapatkan serta mengolah sumber-sumber pendapatannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah. Kemajuan suatu daerah tergantung pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah

tersebut. Selain membutuhkan sumber daya yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang baik juga memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai.

### Kinerja APBD Berdasarkan Rasio Pertumbuhan

Kinerja keuangan adalah kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap aktivitas untuk melihat sudah sejauh mana tingkat keberhasilan suatu entitas dalam melaksanakan pekerjaannya dan menilai apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tingkat kinerja keuangan dapat diukur oleh pemerintah dengan maksud untuk mengetahui tingkat pencapaian keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam mengukur tingkat kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya maka digunakan analisis rasio pertumbuhan. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2007:241).

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Metode Penelitian

#### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk mengukur rasio pertumbuhan APBD dengan mengumpulkan data APBD kota Medan, yang kemudian data tersebut disusun, dihitung rasionya dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pertumbuhan keuangan daerah Kota Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data APBD Pemerintah Kota Medan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa Laporan APBD Pemerintah Kota Medan Tahun 2015 s/d 2021. Sumber data dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan BPS Sumatera Utara.

### Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa laporan APBD Kota Medan tahun anggaran 2015 hingga 2021
2. Menghitung kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Utara yaitu rasiopertumbuhan.
3. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio keuangan dari masing-masing periode tahun 2015-2021.
4. Mengambil kesimpulan atas hasil analisis rasio pertumbuhan.

### III. Hasil Dan Pembahasan

Kinerja merupakan capaian usaha dalam melakukan aktivitas keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah Kota Medan dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Kota Medan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis yaitu dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan.

#### Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan realisasi pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai. Ada 2 perhitungan dalam rasio pertumbuhan yang akan dianalisis pada penelitian ini yaitu :

#### Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah dari periode ke periode selanjutnya.

Rumus Rasio Pertumbuhan Pendapatan : 
$$\frac{PD \text{ Tahun } p - PD \text{ Tahun } p-1}{PD \text{ Tahun } p-1} \times 100 \%$$

Tabel 1. Data Keuangan APBD Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah
2015	1.489,72 M	4.259,04 M
2016	1.535,31 M	4.308,12 M
2017	1.739,76 M	4.409,07 M
2018	1.636,20 M	4.253,62 M
2019	1.829,67 M	5.518,77 M
2020	1.509,48 M	4.121,59 M
2021	1.906,51 M	5.023,08 M

Hasil Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan :

Tahun 2015 - 2016

$$\begin{aligned} &: \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100 \% \\ &: \frac{\text{PAD Tahun 2016} - \text{PAD Tahun 2015}}{\text{PAD Tahun 2015}} \times 100 \% \\ &: \frac{1.535,31 \text{ M} - 1.489,72 \text{ M}}{1.489,72 \text{ M}} \times 100 \% \\ &: 3,06 \% \end{aligned}$$

Tahun 2016 - 2017

$$\begin{aligned} &: \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100 \% \\ &: \frac{\text{PAD Tahun 2017} - \text{PAD Tahun 2016}}{\text{PAD Tahun 2016}} \times 100 \% \\ &: \frac{1.739,76 \text{ M} - 1.535,31 \text{ M}}{1.535,31 \text{ M}} \times 100 \% \\ &: 13,31 \% \end{aligned}$$

Tahun 2017 - 2018

$$\begin{aligned} &: \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100 \% \\ &: \frac{\text{PAD Tahun 2018} - \text{PAD Tahun 2017}}{\text{PAD Tahun 2017}} \times 100 \% \\ &: \frac{1.636,20 \text{ M} - 1.739,76 \text{ M}}{1.739,76 \text{ M}} \times 100 \% \\ &: -5,95 \% \end{aligned}$$

Tahun 2018 - 2019

$$\begin{aligned} &: \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100 \% \\ &: \frac{\text{PAD Tahun 2019} - \text{PAD Tahun 2018}}{\text{PAD Tahun 2018}} \times 100 \% \\ &: \frac{1.829,67 \text{ M} - 1.636,20 \text{ M}}{1.636,20 \text{ M}} \times 100 \% \\ &: 11,82 \% \end{aligned}$$

Tahun 2019 - 2020

$$\begin{aligned} &: \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100 \% \\ &: \frac{\text{PAD Tahun 2020} - \text{PAD Tahun 2019}}{\text{PAD Tahun 2019}} \times 100 \% \\ &: \frac{1.509,48 \text{ M} - 1.829,67 \text{ M}}{1.829,67 \text{ M}} \times 100 \% \\ &: -17,49 \% \end{aligned}$$

Tahun 2020 - 2021

$$\begin{aligned} &: \frac{\text{PAD Tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100 \% \\ &: \frac{\text{PAD Tahun 2021} - \text{PAD Tahun 2020}}{\text{PAD Tahun 2020}} \times 100 \% \\ &: \frac{1.906,51 \text{ M} - 1.509,48 \text{ M}}{1.509,48 \text{ M}} \times 100 \% \\ &: 26,3 \% \end{aligned}$$

Hasil Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Medan :

Tahun 2015 - 2016

$$: \frac{\text{PD Tahun } p - \text{PD Tahun } p-1}{\text{PD Tahun } p-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{PD Tahun 2016} - \text{PD Tahun 2015}}{\text{PD Tahun 2015}} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.308,12 \text{ M} - 4.259,04 \text{ M}}{4.259,04 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 1,15 \%$$

Tahun 2016 - 2017

$$: \frac{\text{PD Tahun } p - \text{PD Tahun } p-1}{\text{PD Tahun } p-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{PD Tahun 2017} - \text{PD Tahun 2016}}{\text{PD Tahun 2016}} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.409,07 \text{ M} - 4.308,12 \text{ M}}{4.308,12 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 2,34 \%$$

Tahun 2017 - 2018

$$: \frac{\text{PD Tahun } p - \text{PD Tahun } p-1}{\text{PD Tahun } p-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{PD Tahun 2018} - \text{PD Tahun 2017}}{\text{PD Tahun 2017}} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.253,62 \text{ M} - 4.409,07 \text{ M}}{4.409,07 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: -3,5 \%$$

Tahun 2018 - 2019

$$: \frac{\text{PD Tahun } p - \text{PD Tahun } p-1}{\text{PD Tahun } p-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{PD Tahun 2019} - \text{PD Tahun 2018}}{\text{PD Tahun 2018}} \times 100 \%$$

$$: \frac{5.518,77 \text{ M} - 4.253,62 \text{ M}}{4.253,62 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 29,74 \%$$

Tahun 2019 - 2020

$$: \frac{\text{PD Tahun } p - \text{PD Tahun } p-1}{\text{PD Tahun } p-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{PD Tahun 2020} - \text{PD Tahun 2019}}{\text{PD Tahun 2019}} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.121,59 \text{ M} - 5.518,77 \text{ M}}{5.518,77 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: -25,31 \%$$

Tahun 2020 - 2021

$$: \frac{\text{PD Tahun } p - \text{PD Tahun } p-1}{\text{PD Tahun } p-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{PD Tahun 2021} - \text{PD Tahun 2020}}{\text{PD Tahun 2020}} \times 100 \%$$

$$: \frac{5.023,08 \text{ M} - 4.121,59 \text{ M}}{4.121,59 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 21,8 \%$$

### Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja merupakan analisis rasio yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja daerah dari tahun ke tahun.

$$\text{Rumus Rasio Pertumbuhan Belanja} : \frac{\text{Belanja Tahun } p - \text{Belanja Tahun } p-1}{\text{Belanja Tahun } p-1} \times 100 \%$$

Tabel 2. Data Keuangan APBD Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2015-2021

Tahun	Belanja Daerah
2015	4.374,97 M
2016	4.525,23 M
2017	4.395,83 M
2018	4.215,00 M
2019	5.060,73 M
2020	3.993,25 M
2021	4.499,15 M

### Hasil Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2015 - 2016

$$: \frac{\text{BD Tahun } P - \text{BD Tahun } P-1}{\text{BD Tahun } P-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{BD Tahun } 2016 - \text{BD Tahun } 2015}{\text{BD Tahun } 2015} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.525,23 \text{ M} - 4.374,97 \text{ M}}{4.374,97 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 3,43 \%$$

### Tahun 2016 - 2017

$$: \frac{\text{BD Tahun } P - \text{BD Tahun } P-1}{\text{BD Tahun } P-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{BD Tahun } 2017 - \text{BD Tahun } 2016}{\text{BD Tahun } 2016} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.395,83 \text{ M} - 4.525,23 \text{ M}}{4.525,23 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: - 2,85$$

### Tahun 2017 - 2018

$$: \frac{\text{BD Tahun } P - \text{BD Tahun } P-1}{\text{BD Tahun } P-1} \times 100 \%$$

$$: \frac{\text{BD Tahun } 2018 - \text{BD Tahun } 2017}{\text{BD Tahun } 2017} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.215,00 \text{ M} - 4.395,83 \text{ M}}{4.395,83 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: - 4,11$$



Tahun 2018 - 2019

$$: \frac{BD \text{ Tahun P} - BD \text{ Tahun P-1}}{BD \text{ Tahun P-1}} \times 100 \%$$

$$: \frac{BD \text{ Tahun 2019} - BD \text{ Tahun 2018}}{BD \text{ Tahun 2018}} \times 100 \%$$

$$: \frac{5.060,73 \text{ M} - 4.215,00 \text{ M}}{4.215,00 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 20 \%$$

Tahun 2019 - 2020

$$: \frac{BD \text{ Tahun P} - BD \text{ Tahun P-1}}{BD \text{ Tahun P-1}} \times 100 \%$$

$$: \frac{BD \text{ Tahun 2020} - BD \text{ Tahun 2019}}{BD \text{ Tahun 2019}} \times 100 \%$$

$$: \frac{3.993,25 \text{ M} - 5.060,73 \text{ M}}{5.060,73 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: -21 \%$$

Tahun 2020 - 2021

$$: \frac{BD \text{ Tahun P} - BD \text{ Tahun P-1}}{BD \text{ Tahun P-1}} \times 100 \%$$

$$: \frac{BD \text{ Tahun 2021} - BD \text{ Tahun 2020}}{BD \text{ Tahun 2020}} \times 100 \%$$

$$: \frac{4.499,15 \text{ M} - 3.993,25 \text{ M}}{3.993,25 \text{ M}} \times 100 \%$$

$$: 12,6 \%$$

Analisis Pembahasan

Tabel 3. Persentase Rasio Pertumbuhan

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAD		3,06 %	26,3 %	- 5,95 %	11,82 %	-17,49 %	13,31 %
PD		1,15 %	2,34 %	-3,5 %	29,74 %	- 25,31 %	21,8 %
BD		3,43 %	- 2,85	- 4,11	20 %	- 21 %	12,6 %

Berdasarkan data rasio pertumbuhan yang tercantum dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk Pemerintah Daerah Kota Medan tahun anggaran 2015 – 2021 menunjukkan hasil yang fluktuatif/cenderung naik turun. Pertumbuhan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,3% dan pertumbuhan pendapatan asli daerah paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar - 17,49%. Sedangkan untuk Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Medan dari tahun 2015 – 2021 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 29,74% dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar - 25,31%.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan di atas diketahui juga bahwa tingkat pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan cenderung naik turun. Untuk Belanja Daerah tahun 2016 dengan hasil positif dan 2017-2018 mengalami pertumbuhan yang negatif dan tahun berikutnya fluktuatif. Pertumbuhan Belanja

Daerah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 20 % dan pertumbuhan Belanja Daerah paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar - 21 %.

#### IV. Kesimpulan

Rasio pertumbuhan adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan/peningkatan kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan/ mempertahankan kinerja keberhasilan yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. dengan kategori masing-masing komponen yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Sebelumnya Rasio Pertumbuhan dapat kita gunakan untuk menjadi tolak ukur kita mengevaluasi potensi-potensi daerah. Semakin tinggi nilai pertumbuhan PAD, PD dan BD pemerintah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dan begitu sebaliknya. Berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa Kota Medan masih belum stabil dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan asli daerah sehingga mempengaruhi pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan. Begitu juga dengan kinerja pertumbuhan belanja daerah. Dengan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kota Medan dan mengoptimalkan penggunaan dana belanja daerah kita bisa mempertahankan kinerja keuangan daerah Kota Medan.

#### V. Daftar Pustaka

- Amanda dkk. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 1, October 2021, pp. 52 – 62.
- Nurul Rigel. Juni 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK. Vol.8 No. 1, Hal. 33-48.
- Lestari dkk. Juni 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Cendekia Akuntansi. Volume 3, Nomor 1
- Hasnita Nita. Agustus 2021. Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 2 No. 8.
- Fidelius. Desember 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4, Hal. 2088-2096 Dilansir dari : <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=02&pemd a=15>
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Yanti, Amelia. April 2022. Analisis Rasio Keuangan Apbd Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. Akuntansi Prima. Volume 4 No.1 / 30.